

Vol. 19 No.1, Maret 2021 – September 2021

ISSN 1412-9000

PERSPEKTIF

JURNAL STUDI INTERDISIPLINER

**FISIP JOURNAL
OF
INTERDISCIPLINARY
STUDIES**

HUBUNGAN ANTARA NILAI BUDAYA LOKAL DAN PRODUK YANG KOMPETITIF
Siti HAJAR

FEMINISME DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL
Subarno WIJATMADJA

VAKSINASI UNTUK PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT
Deradjat Mahadi SASOKO

KENDALA DEMOKRATISASI DI NEGARA-NEGARA ARAB
Saiful SYAM

RUBRIK FILSAFAT: FILSAFAT LOCKE
Subarno WIJATMADJA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA**

ISSN 1412-9000

PERSPEKTIF

JURNAL STUDI INTERDISIPLINER
Vol. 19 No. 01, Maret 2021 – September 2021

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Mitra Bestari :

H. Saiful Syam, Drs., MA., PhD.
Poppy Setiawati Nurisnaeny, Dra., M.S., Dr.
Asrudin Azwar, S. Sos, M. Si.
Hj. Siti Hajar, Dra., M.S., PhD.

Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi :

Subarno Wijatmadja, Drs., M.Hum

Dewan Redaksi :

Ambarwati, Dra., M.Si., Dr.
Moh. Maiwan, Drs., M.Si., PhD.
Reni Arlyan, S.Sos., M. Hub. Int.
Laila Indriyanti Fitria, S.Sos., M.Si
Nina Widyaswasti Aisha, S.Sos.

Sekretariat :

Supriyati, AMd.

Distribusi dan Sirkulasi :

Kusyoto

Alamat Redaksi :

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya
Jl. Pulomas Selatan, Kav. 23. Jakarta 13210
Telp. (021) 4700903.

Redaksi Mengundang anda untuk mengirimkan Karya Ilmiah dan Hasil Penelitian yang sesuai dengan visi Jurnal ini. Naskah yang dikirim hendaknya asli, belum pernah dipublikasikan, diketik dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran 12, sebanyak 12 – 14 halaman kuarto, spasi tunggal. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris, meliputi: *Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Metodologi, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan, dan Daftar Pustaka untuk hasil penelitian dan untuk hasil pemikiran ilmiah/kajian teoritik meliputi : Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Kesimpulan dan Daftar Pustaka. Penulisan kutipan dapat menggunakan model MLA, APA, tradisional dan lain-lain, yang bila memungkinkan akan diubah menjadi model tradisional end notes. Penulis wajib menyertakan Bio Data singkat dan isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis serta tidak mencerminkan opini redaksi.*

PERSPEKTIF

JURNAL STUDI INTERDISIPLINER

Vol. 19 No. 01, Maret 2021 – September 2021

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	iii
PENGANTAR REDAKSI.....	v
HUBUNGAN ANTARA NILAI BUDAYA LOKAL DAN PRODUK YANG KOMPETITIF	1
Dra. Hj. Siti HAJAR, MS., Ph.D	
FEMINISME DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL	9
Subarno WIJATMADJA	
VAKSINASI UNTUK PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT	15
Deradjat Mahadi SASOKO, Drs., MM.	
KENDALA DEMOKRATISASI DI NEGARA - NEGARA ARAB.....	22
Drs. H. Saifull SYAM, MA., Ph.D	
RUBRIK FILSAFAT: FILSAFAT LOCKE.....	27
Subarno WIJATMADJA	

Tentang Penulis

PERSPEKTIF

JURNAL STUDI INTERDISIPLINER

Vol. 19 No. 01, Maret 2021 – September 2021

Pengantar Redaksi

Konon katanya, bahagia itu sederhana. Bisa mensyukuri hal-hal kecil saja sudah membuat kita tersenyum dan berterima kasih. Begitu juga dengan penerbitan Perspektif edisi kali ini. Sekalipun dalam tampilan yang sederhana, namun bisa menerbitkannya membuat kami senang. Pada edisi kali ini, kami tampilkan lima tulisan ilmiah yang aktual tentang berbagai topik yang lagi ramai dibicarakan.

Tulisan pertama tentang hubungan antara nilai budaya lokal dan produk yang kompetitif. Sebagaimana diketahui, budaya berperan penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam menghasilkan produk-produk yang kompetitif. Artikel ini ditulis oleh Dra. Siti Hajar, MS. Ph.D yang kemudian disambung dengan artikel kedua yang disajikan oleh Subarno Wijatmadja yang mengetengahkan masalah feminisme dalam hubungan internasional. Sedangkan artikel ketiga membahas tentang vaksinasi dalam kaitannya dengan wabah corona virus. Drs. Deradjat Mahadi Sasoko mengemukakan tentang pentingnya vaksinasi bagi perlindungan dan keselamatan masyarakat. Drs. Saiful Syam, MA., Ph.D sebagai penulis keempat mengetengahkan makalah yang berjudul Kendala Demokratisasi di Negara-Negara Arab. Musim semi Arab telah memporakporandakan tatanan di negara-negara Arab sehingga pemaksaan demokratisasi akan mengalami hambatan apabila budaya masyarakat belum mendukungnya. Akhirnya artikel ditutup dengan rubrik filsafat yang menampilkan filsafat John Locke.

Kami berharap mudah-mudahan naskah yang ditampilkan dalam edisi ini bisa menambah wawasan para pembaca sekalian. Tidak lupa kami mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bisa menjadi lebih baik lagi di masa depan.

Redaksi

KENDALA DEMOKRATISASI DI NEGARA-NEGARA ARAB

Saiful Syam, Ph.D

ABSTRACT

This article discusses the absence of a democratic transition in Arab countries even though the people themselves who are spearheaded by the people have carried out rebellions. Only one Arab country after the uprising has succeeded in becoming a democratic country, namely Tunisia. It is not democracy that is created as a whole, but instead leaves three crucial things, namely mass violence, civil war and terrorism. Although there are authoritarian regimes that have been overthrown, namely in Tunisia, Egypt and Libya, authoritarian regimes in Arab monarchies are still well established and even have Western support. This proves that Arab countries are still characterized by a democratic deficit as a logical consequence of the slow process of democratization. So this article focuses on the question of why democratization is not happening in the Arab world? What are the obstacles?

Keywords: democracy, democratization, authoritarian, Arab world

1. Pendahuluan

Negara-negara Arab terkenal kebal terhadap demokrasi. Ini sudah ‘teruji’ melalui pemberontakan rakyatnya yang dipelopori kaum muda, dikenal sebagai Musim Semi Arab (*Arab Spring*) satu dekade yang lalu itu, hanya menghasilkan satu negara demokratis Tunisia. Pemberontakan rakyat Arab itu sendiri malah menyisakan tiga hal krusial yakni: kekerasan skala besar, perang saudara dan terorisme. Karena itu Musim Semi Arab sebagai wujud dari upaya *democracy from below* dianggap gagal dan ini bermakna tidak terjadi gelombang keempat demokratisasi di dunia Arab, sehingga semakin kuat pandangan para pakar politik Barat bahwa negara-negara Arab tetap bercirikan defisit demokrasi dan defisit legitimasi. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain dan juga kawasan lain, demokratisasi di negara-negara Arab ketinggalan jauh karena proses demokratisasinya berjalan sangat lambat. Ini yang menimbulkan anggapan bahwa dunia Arab belum menerima demokrasi walaupun proses demokratisasinya sudah lama dilakukan secara *top-down* berwujud reformasi konstitusional. Namun proses transisi demokratis itu tidak membentuk demokrasi. Menurut Diamond, ketika gelombang ketiga dimulai pada tahun 1974, dunia hanya memiliki sekitar 40 negara demokrasi, dan hanya sedikit di antaranya yang berada di luar Barat. Pada saat *Journal of Democracy* mulai diterbitkan pada tahun 1990, terdapat 76 negara demokrasi elektoral (terhitung kurang dari setengah negara merdeka dunia). Pada 1995, jumlah itu melonjak menjadi 117 — tiga di setiap lima negara kawasan. Pada saat itu, massa demokrasi kritis sudah ada di setiap kawasan utama dunia kecuali satu — Timur Tengah. Selain itu, setiap kawasan budaya utama dunia telah menjadi tuan rumah bagi kehadiran demokrasi yang signifikan, meskipun sekali lagi dengan satu pengecualian — dunia Arab. Lima belas tahun

kemudian, pengecualian ini masih berlaku.¹ Muncul pandangan pesimistis bahwa untuk studi ilmu politik, transisi demokrasi di negara-negara Arab adalah topik yang sangat sulit karena nyaris tidak ada transisi demokrasi yang berhasil di negara-negara Arab yang berhasil untuk penelitian (Liu, 2015)²

Timur Tengah yang mayoritas terdiri dari negara-negara muslim Arab menunjukkan kepada dunia bahwa perjuangan membentuk masyarakat demokratis di kawasan itu ternyata tidak mudah, bahkan promosi demokrasi Barat oleh Amerika Serikat (AS) pasca tragedi 11 September 2001 dapat dibilang gagal total. Rejim negara-negara Arab yang otokratis baik republik maupun monarki melakukan resistensi terhadap gelombang tuntutan rakyatnya untuk demokrasi. Resistensi rejim di negara Arab republik berakibat fatal yaitu perang saudara di Lybia, Yaman dan Suriah. Mesir kembali di bawah dominasi militer. Monarki Arab, yang bukan warisan Nabi Muhammad, bercirikan otokrat tetap eksis malah mendapat dukungan Barat. Artikel ini fokus pada persoalan mengapa demokratisasi tidak terjadi di dunia Arab? Apa saja yang menjadi kendalanya?

2. Konsep Demokratisasi

Demokratisasi adalah sebuah perjalanan, sebuah proses dan itu bukanlah suatu kondisi. Perjalanan setiap masyarakat adalah unik dengan lingkungan sejarah, tradisional, budaya, ekonomi, dan politiknya sendiri. Proses demokratisasi merupakan komitmen jangka panjang dari mayoritas masyarakat suatu negara yang kemudian membentuk sebudaya demokrasi. Karena itu demokrasi menjadi sistem yang memberi kesempatan kepada rakyat pada umumnya untuk berpartisipasi agar pemerintahan yang berjalan dapat mengutamakan kebaikan terhadap rakyat. Demokratisasi sejatinya memuat empat unsur, yaitu akuntabilitas, pemilihan umum, hak-hak sipil dan politik, dan asosiasi (Najem, 2003).³

Dengan demikian pemerintahan demokratis harus menggabungkan tiga kondisi penting: persaingan yang berarti untuk kekuasaan politik antara individu dan kelompok terorganisir; partisipasi inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, setidaknya melalui pemilihan yang bebas dan adil; dan tingkat kebebasan sipil dan politik yang cukup untuk memastikan integritas kompetisi dan partisipasi politik (Schnabel, 2003).⁴ Partisipasi dan kontestasi sangat penting: sementara demokrasi dapat mengambil banyak bentuk, tidak ada sistem yang dapat disebut demokratis tanpa makna yang berarti. keduanya. Hanya jika warga negara merasa bahwa pemerintah mereka bertanggung jawab, mewakili semua kelompok dan individu, kendali mereka, dan tanggap terhadap keprihatinan masyarakat sipil, barulah pemerintah menikmati otoritas - namun jarang apresiasi - untuk mengarahkan

¹ Larry Diamond, Why There is No Arab Democracy?, *Journal of Democracy*, January 2010, Volume 21, Number 1.

² Liu, Zhongmin, Middle East Upheavels and Democratic Transition of Arab Countries, dalam *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, <https://doi.org/DOI: 10.1080/19370679.2015.12023262>

³ Tom Piere Najem, State Power and Democratization in North Africa: Developments in Morocco, Algeria, Tunisia, and Libya, *Democratization in the Middle East: Experiences, struggles*, Amin Saikal and Albrecht Schnabel, Ed. 2003. Tokyo: United Nations University Press.

⁴ Albert Schnabel, Democratization and Peacebuilding, dalam *Democratization in the Middle East: Experiences, struggles*, Amin Saikal and Albrecht Schnabel, Ed. 2003. Tokyo: United Nations University Press.

masyarakat melalui perairan yang sulit dan menyakitkan dari transisi pasca-konflik.⁵ Oleh karena itulah, secara sederhana demokratisasi sebagai gerakan dalam masyarakat dari pemerintah yang kurang akuntabel menjadi pemerintah yang lebih akuntabel, dari pemilu yang kurang kompetitif (atau tidak ada) hingga pemilu yang lebih bebas dan kompetitif, dari hak-hak sipil dan politik yang sangat dibatasi menjadi lebih terlindungi dengan lebih baik, dan dari asosiasi otonom yang lemah (atau tidak ada) dalam masyarakat sipil ke asosiasi yang lebih otonom dan lebih banyak.⁶

Dalam konteks transisi demokratis di negara-negara Arab, upaya kearah pembentukan sistem politik yang demokratis belum terjadi padahal sudah melalui paling tidak tiga tahap demokrasi, yaitu reformasi konstitusional awal, gelombang ketiga demokratisasi dan reformasi demokrasi di bawah dampak berakhirnya Perang Dingin, dan selama proses demokratisasi di bawah tekanan dari inisiatif "Timur Tengah Raya" AS di abad baru (Liu, 2015).⁷ Demokratisasi juga berkaitan dengan sistem politik yang dianut oleh negara. Dalam konteks negara-negara Arab, sistem politiknya tidak sama, yaitu republik dan monarki. Liu selanjutnya menjelaskan bahwa negara-negara pendahulu Republik Arab memiliki pengalaman semi-demokratisasi di akhir masa kolonial, tetapi tidak satupun yang berhasil. Dalam proses dekolonisasi berikutnya, mereka mendirikan republik otoriter setelah revolusi yang dipimpin oleh militer. Contoh negara-negara tersebut adalah Mesir, Tunisia, Aljazair, Libya, Irak, dan Suriah. Negara-negara ini paling menderita akibat pergolakan sejak akhir 2010. Mesir telah menjadi perwakilan khas republik Arab dalam transisi demokrasi, karena mengalami konfrontasi serius antara kekuatan sekuler dan agama, serta intervensi militer terkait. Monarki Arab juga dapat dibagi menjadi dua kategori: yang pertama adalah negara-negara monarki Teluk (termasuk Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Arab Saudi).⁸ Ungkap Liu selanjutnya, mereka memiliki legitimasi tradisional yang mengakar dalam kombinasi politik dan agama serta aturan keluarga bangsawan, yang secara luar biasa memperlambat proses demokrasi; yang kedua adalah negara-negara seperti Yordania dan Maroko. Kedua negara memiliki ciri monarki konstitusional, dan proses demokratisasi mereka berjalan lebih lancar daripada monarki absolut. Mereka mengadakan pemilihan parlemen, dan raja biasanya menstabilkan ketidakpuasan publik dengan mengganti Kabinet.⁹

Fakta menunjukkan bahwa di negara-negara Arab masih sering terjadi kekerasan struktural di dalam dan di antara masyarakatnya dan juga fundamentalisme Islam; peran negatif dari kekuatan-kekuatan besar eksternal; konflik Israel-Palestina; warisan sejarah panjang kekerasan; dan benturan antara norma dan nilai politik dan spiritual Barat dan lokal juga regional, Demokrasi liberal yang ingin diterapkan Barat di negara-negara Arab berbenturan dengan kondisi realitas yang dihadapi mayoritas masyarakat Arab. Demokrasi liberal berkembang paling baik di ekonomi kuat dengan kelas menengah yang cukup besar, dan disandera oleh perpecahan internal. Di dunia Arab, elemen-elemen tersebut bertentangan dengan keberhasilan demokrasi. Negara-negara Arab sering terbelah oleh perpecahan linguistik, etnis, sosial, dan agama. Ekonomi mereka seringkali bergantung pada sumber daya alam, dan tidak adanya ekonomi yang terdiversifikasi menghalangi munculnya borjuasi yang

⁵ Albert Schnabel, *ibid*

⁶ Albert Schnabel, *loc.cit*

⁷ Liu, *ibid*

⁸ Liu, *op.cit*

⁹ Liu. *op.cit*

tangguh – tulang punggung masyarakat sipil dan demokrasi liberal. Tanpa elemen-elemen ini, upaya demokratisasi di dunia Arab telah memicu bukannya menghambat ekstremisme politik dan agama, sektarianisme sosial, korupsi dan nepotisme, terorisme, dan represi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara Arab hampir tidak memiliki semua prasyarat sejarah, budaya, ekonomi, dan sosial yang diperlukan agar demokrasi liberal untuk dapat berakar, mendorong reformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa hambatan oleh permusuhan partisan.

3. Proses Demokratisasi Di Negara-Negara Arab

Sebetulnya proses demokratisasi di dunia Arab sudah dilakukan jauh sebelum peristiwa Musim Semi Arab baik di Arab republik maupun Arab monarki. dibagi menjadi tiga tahap, yaitu, reformasi konstitusional awal, gelombang ketiga demokratisasi dan reformasi demokrasi di bawah dampak berakhirnya Perang Dingin, dan selama proses demokratisasi di bawah tekanan dari inisiatif "Timur Tengah Raya" AS di abad baru,¹⁰

Ambisi Barat untuk menanam demokrasi di dunia Arab telah gagal total. Baik itu setelah intervensi militer asing di Irak dan Libya atau setelah protes sipil di Mesir, Yaman, dan Tunisia, penggulingan diktator hampir tidak melahirkan demokrasi liberal yang stabil, dengan masing-masing negara Arab tenggelam ke dalam perselisihan dan barbarisme yang lebih besar. Eskalasi kekerasan yang penuh gejolak dan berlanjutnya sanksi internasional terhadap Irak dan penduduknya yang menderita, kekerasan yang terus berlanjut di Aljazair, dan kekerasan struktural tingkat tinggi yang dilakukan oleh pemerintah otoriter di hampir semua negara di kawasan ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Timur Tengah masih jauh dari kondisi perdamaian yang stabil. Konflik, kekerasan, dan penindasan, terutama di era globalisasi ini, menghasilkan stagnasi ekonomi dan sosial yang akan meminggirkan negara-negara tersebut, dan kawasan secara keseluruhan, bahkan lebih jauh lagi dalam lingkungan di mana perdamaian dan stabilitas politik menjadi fondasi dasar daya saing ekonomi dalam ekonomi global.

Kurangnya sistem politik terbuka, pemerintahan otoriter oleh pemerintah otokratis, dan sebagian besar kekerasan dan perjuangan represif pemerintah dengan gerakan dan kelompok oposisi merupakan faktor kunci dalam membatasi potensi masyarakat ini untuk pembangunan manusia, ekonomi, dan sosial. Demokratisasi sejati, jika berhasil dan berkelanjutan, dapat menghasilkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, inklusif, alih-alih pemerintahan yang eksklusif dan represif. Liberalisasi sistem politik dan ekonomi di seluruh kawasan dapat mendukung perdamaian domestik dan, selanjutnya, memperkuat perdamaian dan stabilitas kawasan. Tentu saja, transisi dari sistem otokratis dan tertutup ke sistem terbuka dan demokratis tidak dapat diwujudkan tanpa perjuangan.

4. Multi Kendala Demokratisasi di Negara-negara Arab

Beragam pendapat dari para sarjana Barat maupun sarjana Arab sendiri mengenai kendala demokratisasi di negara-negara Arab itu yang pada umumnya sepakat adanya multi

¹⁰ Liu, op.cit

sebab, yakni kendala internal dan eksternal Arab. Eva Bellin meyakini faktor internal Arab sebagai kendala utama, yaitu berupa kekokohan otoritarianisme rejim Arab republik maupun arab monarki.¹¹ Kata Bellin selanjutnya, otoritarianisme telah terbukti sangat kuat karena aparat koersif sangat mampu dan berkeinginan untuk menghancurkan inisiatif reformasi dari bawah.¹² Sarjana Arab seperti Muhammad Huweih meyakini pada faktor internal Arab yaitu elit sekuler sebagai variable dominan dari tiga variable lainnya yang menjadi kendala utama seperti minyak, Islam dan intervensi Barat.¹³

Fadli Elhousseini mengutip pendapat Abdel Khaliq Hussein yang memberikan sembilan alasan yakni sistem nilai tradisional, Islam politik, konflik agama dan perselisihan sektarian, tidak adanya masyarakat sipil yang terorganisir, buta huruf dan kebodohan, penindasan terhadap perempuan, krisis partai oposisi, fragmentasi kekuatan pemuda revolusi dan yang tak kalah pentingnya adalah ledakan populasi.¹⁴ Senada dengan itu, Mustafa Dabee (2013) mengatakan bahwa jalan demokrasi di dunia Arab menghadapi kendala internal dan eksternal, menekankan pada esensialitas pendidikan dan persiapan masyarakat sebagai prasyarat untuk mempraktikkan demokrasi yang sehat. Di sisi lain, beberapa sarjana memilih untuk menghubungkan peran kekuatan asing, dan dukungan mereka kepada rezim atau minoritas tertentu dan intervensi terbuka mereka dalam masalah domestik, dengan kondisi demokrasi yang buruk di Dunia Arab.

Secara lebih terinci Fadli Elhousseini menjelaskan lima kendala dimaksud, yaitu *pertama*, kesiapan (berlaku untuk Dunia Arab secara umum): masyarakat Arab tidak memiliki kesempatan untuk mempraktikkan demokrasi sejak kematian khalifah keempat Imam Ali Bin Abi Thalib, 1352 tahun yang lalu. Meskipun para penguasa mengklaim sebaliknya, kawasan itu belum mempraktikkan demokrasi yang sehat, yang menyebabkan memburuknya kondisi demokrasi di dunia Arab. Oleh karena itu, kesiapsiagaan sosial menjadi sangat penting. Dibandingkan dengan kondisi masyarakat Arab saat ini, revolusi di negara-negara Eropa Tengah dan Timur tidak akan berhasil tanpa lingkungan yang sesuai. *Kedua*, kurangnya pengalaman dan budaya demokrasi. Orang-orang Arab tidak mengalami demokrasi selama berabad-abad dan praktik demokrasi menjadi bahan penilaian setelah Musim Semi Arab. Misalnya, Ketika Ikhwanul Muslimin berkuasa, perilakunya menekan lembaga-lembaga yang seharusnya berdiri di luar politik partisan dan mengirim pengikut untuk mencegah pertemuan Mahkamah Konstitusi. Juga, Ikhwanul memanggil pengikutnya untuk melindungi istana presiden pada Desember 2012 dan mereka menyerang, memukul, dan menginterogasi demonstran lainnya. Ikhwanul Muslimin tidak antidemokrasi, tetapi konsepsinya tentang demokrasi dangkal dan seringkali tidak liberal.

Ketiga, kompleksitas suku dan sektarian (berlaku untuk Libya, Yaman dan Suriah): Suriah merupakan mosaik keagamaan yang unik yang mencakup Sunni, Syiah, Alawi, Nusayris di samping kelompok lain seperti Syria, Armenia, Turkmenistan dan Arab. Hubungan agama, sektarian, dan etnis itu tetap lebih kuat daripada hubungan lain apa pun

¹¹ Bellin, Eva, The Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Exceptionalism in Comparative Perspective, dalam *Comparative Politics*, Vol. 36, No. 2, January 2004

¹² Bellin, ibid

¹³ Muhammad Huweih, Barriers to Democracies in Arab World, Thesis, Georgia State University, 2015.

https://scholarworks.gsu.edu/political_science_theses/63

¹⁴ Fadli Elhousseini, Democracy and Democratization in the Arab World: Unending Struggle. *The Canadian Journal for Middle East Studies* July 2016, Vol. 1, No. 2,

dengan pemerintah atau lembaga politik mana pun. Di Libya dan Yaman, budaya kesukuan membatasi perilaku orang-orang pada hubungan mereka dengan suku mereka dan subordinasi terhadap keputusan kepala suku melampaui kebijakan politik lainnya. Ketika diktator jatuh, kelompok-kelompok itu memperkuat ikatan mereka karena berbagai alasan, di antaranya keamanan dan kekuasaan.

Keempat, emulasi (berlaku untuk kasus Mesir): Ketergesaan dan semangat orang Arab untuk mencapai demokrasi yang serupa dengan negara lain adalah masalah lain. Dengan munculnya Musim Semi Arab, semua orang memegang harapan besar untuk demokrasi dan seruan untuk mengadopsi model demokrasi Barat atau Turki mulai bergema di setiap sudut dunia Arab. Namun demikian, orang dapat berargumen bahwa mengambil jalan pintas historis tidak selalu berhasil. Eropa telah membayar harga yang mahal, termasuk perang dan revolusi, sampai ia meletakkan dasar demokrasinya yang matang. Orang Turki juga telah mengakui bahwa mereka telah membayar mahal untuk mengembangkan merek demokrasi mereka sendiri, termasuk standar dan institusi demokrasi untuk menegakkan hak-hak individu. Erşat Hürmüzlü, kepala penasihat Presiden Turki, mengatakan bahwa Turki telah merancang nasib mereka sendiri, mengakui bahwa sepanjang jalan demokrasi di Turki, banyak kesalahan telah dibuat, tetapi belajar dari kesalahan telah menjadi alat terbaik untuk membangun praktik yang lebih baik. Peran militer saat ini dan gagasan untuk mempercayakan militer dengan peran perlindungan rezim (seperti di Mesir) adalah cerminan yang jelas dari seberapa jauh pemberontakan ini terobsesi untuk meniru model lain, terutama yang Turki.

Kelima, intervensi asing (berlaku untuk Suriah, Libya dan Yaman): seperti yang telah kita lihat sebelumnya, intervensi asing mengubah perjuangan demokrasi menjadi perang saudara 'proksi'. Misalnya, di Suriah kita telah melihat bahwa berbagai kekuatan regional dan global mendukung ISIS, mendanai pemberontak Suriah 'Tentara Pembebasan Suriah', mendukung rezim Assad, dan dengan demikian memperburuk jalan demokrasi yang sudah macet. Demikian pula, Yaman mewakili medan pertempuran untuk kepentingan yang bertentangan di mana kita melihat kekuatan regional melawan pengaruh kekuatan lain.

5. Kesimpulan

Proses demokratisasi di negara-negara Arab masih tampak suram. Belum ada keinginan dari para pemimpin Arab untuk menciptakan proses demokratisasi kearah pembentukan sistem politik demokrasi dengan tiga prinsip utamanya yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokratisasi berkelanjutan dapat dicapai hanya jika sejumlah syarat terpenuhi.¹⁵ Rincian dari argumen Diamond ini adalah *pertama*, demokratisasi datang dari bawah dan dari atas. Tekanan dari bawah hanya akan menguap jika kepemimpinan politik tidak menerima cita-cita pemerintahan demokratis dan tidak mau membuka proses politik, karena takut harus berbagi, atau berpotensi menyerah, kekuasaan politik. Di sisi lain, demokratisasi *top-down* tidak akan tumbuh subur jika budaya politik yang diperlukan belum berkembang dan masyarakat tidak terbiasa dengan, dan mungkin terasing oleh, kebebasan serta tanggung jawab yang menyertai liberalisasi dan partisipasi politik. Demokratisasi yang hanya didukung oleh kepemimpinan atau hanya oleh masyarakat paling lemah dan rapuh,

¹⁵ Larry Diamond, op.cit

paling buruk pasti gagal. Sejauh ini, demokrasi dari atas ke bawah telah menjadi aturan di seluruh Timur Tengah.

Kedua, demokratisasi tidak akan berkelanjutan jika mayoritas berkuasa tanpa memberikan perlindungan yang memadai kepada minoritas, dan jika kelompok etnis minoritas dan kelompok pinggiran agama termarjinalkan, terasing, terdesak kepunahan, dan, sebagai upaya terakhir, didorong untuk melakukan tindakan radikal untuk membuat mereka - diri mendengar. Di seluruh Timur Tengah, negara sejauh ini merasa sulit untuk mendamaikan kepentingan mayoritas dengan kepentingan minoritas.

Ketiga, upaya demokratisasi yang berhasil harus dikaitkan dengan kinerja ekonomi yang kokoh dan stabilitas politik dan, sedapat mungkin, pertumbuhan dan kedewasaan masyarakat sipil yang leluasa. Timur Tengah juga tidak mendapat skor tinggi pada poin terakhir ini. Evolusi masyarakat sipil sangat bergantung pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk kemauan untuk mempertimbangkan masyarakat sipil sebagai mitra dalam meningkatkan tata kelola dan untuk melibatkan mereka dalam dialog tentang langkah dan jalur demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Bellin, Eva, The Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Exceptionalism in Comparative Perspective, dalam *Comparative Politics*, Vol. 36, No. 2, January 2004.

Diamond, Larry Diamond, Why There is No Arab Democracy?, *Journal of Democracy*, January 2010, Volume 21, Number 1.

Huweih, Muhammad Huweih, Barriers to Democracies in Arab World, Thesis, Georgia State University, 2015. https://scholarworks.gsu.edu/political_science_theses/63

Liu, Zhongmin, Middle East Upheavels and Democratic Transition of Arab Countries, dalam *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, <https://doi.org/DOI: 10.1080/19370679.2015.12023262>.

Najem, Tom Piere, State Power and Democratization in North Africa: Developments in Morocco, Algeria, Tunisia, and Libya, *Democratization in the Middle East: Experiences, struggles*, Amin Saikal and Albrecht Schnabel, Ed. 2003. Tokyo: United Nations University Press.

Schnabe, Albert Democratization and Peacebuilding, dalam *Democratization in the Middle East: Experiences, struggles*, Amin Saikal and Albrecht I, Ed. 2003. Tokyo: United Nations University Press.

